



Kasus Tanah di Jalan By-pass IB Mantra Jaksa Jadikan Mantan Hakim Tersangka

Denpasar (Bali Post) -

Pascagagal melakukan eksekusi atas tanah milik PU dalam perkara korupsi di Jalan By-pass Prof. Ida Bagus Mantra dengan terpidana Made Bawa, pihak Kejati Bali tidak main-main atas penguasaan tanah negara itu. Tim Pidsus Kejati Bali pimpinan Polin O Sitanggang memeriksa kasus tersebut. Penyidik telah menetapkan mantan hakim Ida Bagus Rai Pati sebagai tersangka.

Penetapan tersangka itu dibenarkan Kasipenkum Humas Kejati Bali Ashari Kurniawan, Kamis (9/2) kemarin. "Untuk kasus lahan By-pass Prof. Mantra yang sebelumnya masuk perkara korupsi dengan terpidana Made Bawa, kini sudah ada tambahan

tersangka lagi," ucap Ashari didampingi Kasitot Pidsus Kejati Bali Wayan Suardi.

Tersangka Ida Bagus Rai Pati dinaikkan statusnya atas penguasaan tanah negara serta dibuatkan bangunan permanen. Rai Pati menjadi saksi dalam kasus dengan terdakwa Bawa dalam sidang di Pengadilan Tipikor beberapa waktu lalu. Kali ini mantan hakim ini dibidik lantaran tanah negara di By-pass Mantra dipakai, yakni dibuat bangunan permanen. Padahal pihak Kejati Bali sudah memasang pelang bahwa tanah tersebut sitaan Pidsus Kejati Bali dalam perkara korupsi penjualan tanah negara oleh Made Bawa.

Informasi lain dari pihak kejaksaan, tanah yang dikua-

sai tersangka dan belum bisa dilakukan eksekusi seluas lima are. Karenanya pihak kejaksaan dalam perkara korupsi ini menegaskan akan memunculkan masalah baru. Apalagi ada penghapusan pelanggaran kejaksaan di wilayah Keramas, Gianyar.

Sementara Rai Pati sebagaimana disampaikan salah seorang penyidik, mengatakan lahan tersebut sudah disewa dari dua PNS Pemkab Gianyar yang merupakan terpidana kasus korupsi pemalsuan tanda tangan Bupati Gianyar untuk Surat Izin Menggarap (SIM). Made Bawa dalam kasus ini dihukum empat tahun dan saat ini sedang menjalani proses hukuman di Lapas Gianyar. (kmb37)

Edisi : Jumat, 10 Feb 2017

Hal : 5



Polemik Pembebasugasan Gus Gaga Dewan Minta Kajian Pusat Dijadikan Rujukan

Gianyar (Bali Post) -

Kalangan DPRD Gianyar menyayangkan dilanjutkannya proses pemeriksaan terhadap I.B. Gaga Adi Saputra alias Gus Gaga oleh Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Disiplin. Anggota dewan meminta agar hasil investigasi tim pusat dijadikan rujukan dalam menangani masalah pembebasugasan Gus Gaga sebagai Sekda Gianyar.

Anggota DPRD Gianyar dari Fraksi Golkar, Cokorda Putra Indrayana, Kamis (9/2) kemarin, mengaku sangat menyayangkan dilanjutkannya proses pemeriksaan oleh tim bentukan Bupati Gianyar. Hal ini mengingatkan tim dari pusat sudah turun melakukan pemeriksaan. "Kita sayangkan tim ini kembali melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan (Gus Gaga -red), padahal tim pusat yang legalitasnya lebih tinggi sudah turun," ucapnya.

Ia pun mengkhawatirkan bila nanti hasil pemeriksaan pusat dan Pemkab Gianyar berbeda, justru akan memicu permasalahan baru. Sebab itu anggota dewan yang akrab disapa Cok In ini menegaskan, hasil investigasi tim pusat yang legalitasnya lebih teruji harus dijadikan patokan.

"Entah nanti hasilnya sama atau berbeda, kajian dari pusat harus yang dijadikan patokan. Karena memang mereka yang lebih berkompeten melakukan kajian," kata anggota Komisi IV DPRD Gianyar ini.

Ia berharap hasil kajian dari tim pusat dapat dijadikan pedoman mengakhiri semua polemik yang sudah terjadi di Gianyar. Apalagi polemik internal eksekutif ini sudah mengganggu layanan ke masyarakat. "Ini yang paling penting, jangan sampai pelayanan terhadap masyarakat terganggu lagi hanya karena polemik di internal eksekutif," tegasnya.

Sementara anggota dewan dari Fraksi Gerindra, I.B. Nyoman Rai, mengatakan semua harus sepakat bahwa hasil kajian dari pemerintah pusat dijadikan patokan dalam polemik ini. "Kita tunggu tim pusat yang kabarnya sebentar lagi turun. Apa pun hasilnya dari pusat akan kita terima dan dijadikan dasar melakukan pembahasan dengan Bupati Gianyar mengakhiri permasalahan ini," ucapnya.

Ditambahkannya, sejak awal pihaknya sudah meminta eksekutif menghentikan proses pemeriksaan terhadap Gus Gaga karena tim dari pusat sudah turun. "Setelah tim pusat turun, kami dari Fraksi Gerindra sudah menyatakan tidak perlu lagi melanjutkan pemeriksaan. Dari fraksi lain kan sudah juga memberikan statemen terkait ini agar segera selesai," katanya. (kmb35)

Edisi : Jumat, 10 Feb 2017

Hal : 9